



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL : [kominfosandi@jogjakota.go.id](mailto:kominfosandi@jogjakota.go.id)

HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id);

WEBSITE : [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Rabu

Tanggal: 08 Maret 2017

Halaman: 9

## PERTAMA DIGAGAS, TERAKHIR DISAHKAN Dewan Didesak Tuntaskan Perda Disabilitas

**YOGYA (KR)** - Perda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Yogya yang tidak kunjung disahkan mendapat sorotan publik. Forum Penguatan Hak-hak Penyandang Disabilitas yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat pun mendesak agar perda tersebut segera dituntaskan.

Koordinator Forum Penguatan Hak-hak Penyandang Disabilitas Dr Arni Surwanti MSI menuturkan, dari seluruh daerah di DIY, hanya Kota Yogya yang belum memiliki perda disabilitas. Padahal, Kota Yogya bahkan mengawali atau pertama kali meng-

gagas lahirnya perda tersebut. "Kota Yogya ini merupakan satu-satunya yang belum menetapkan dan mengesahkan perda disabilitas. Pertama kalinya menggagas, tapi justru terakhir mengesahkan," tandas Arni di sela aksi damai bersama para penyandang disabilitas yang digelar di gedung DPRD Kota Yogya Jalan Ipda Tut Harsono, Selasa (7/3).

Arni memaparkan, inisiasi perlunya perda terkait perlindungan hak penyandang disabilitas di Kota Yogya sudah diawali sejak 2014 silam. Sejak saat itu pihaknya se-

lalu aktif memberikan masukan, hingga resmi dimasukkan dalam program legislasi pada 2016. Akan tetapi, akhir tahun lalu terjadi penundaan pengesahan perda lantaran harus menyesuaikan dengan aturan baru.

Dukungan aktif yang sudah diberikan oleh para pelaku penyandang disabilitas serta pemerhati pun seakan tidak ada nilainya. Hal tersebut menjadi keprihatinan tersendiri lantaran keberadaan perda itu memberi arti penting dalam upaya memperkuat hak dan menghapus segala bentuk diskriminasi. "Tidak sekadar segera disahkan, tapi setelah itu harus ada alokasi anggaran untuk implementasinya. Sosialisasi juga terus digencarkan supaya masyarakat bisa memahami," urainya.

Wakil Ketua DPRD Kota Yogya M Ali Fahmi mengaku,

proses pembahasan saat ini sudah mendekati tahap akhir. Panitia khusus (pansus) yang membahas perda disabilitas tinggal mencermati lima pasal terakhir dari total ratusan pasal.

Lamanya waktu pembahasan selama ini, imbuh Fahmi, lantaran cakupan yang lebih luas. Mulai dari hak atas pendidikan, kesehatan,

pekerjaan, olahraga dan lain sebagainya. Masing-masing hak itu pun dijabarkan kembali agar memberikan kepastian.

"Misalnya dari sisi pekerjaan, nanti saat ada penerimaan aparatur sipil negara (ASN), maka Kota Yogya wajib memberikan porsi minimal dua persen bagi penyandang disabilitas. Ini meru-

pakan kemajuan yang luar biasa," jelasnya.

Oleh karena itu, setelah pasal demi pasal diselesaikan, kalangan dewan juga akan mengundang berbagai pihak termasuk Forum Penguatan Hak-hak Penyandang Disabilitas guna memberikan sentuhan akhir. Dengan begitu, harapannya tidak ada lagi hak yang tercecer. (Dhi)-o



*Penyandang disabilitas menggelar aksi damai di DPRD Kota Yogya.*

KR-Ardhi Wahdan

| Instansi        | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|-----------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Sosial | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 07 Agustus 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005